



# Diplomasi Dalam Era Globalisasi

Oleh : Hasyim Djalal

**D**iplomasi adalah suatu kegiatan atau perjuangan yang sering dihubungkan dengan politik dan hubungan luar negeri sesuatu negara dalam hubungannya dengan negara lain

Karena itu, dalam diplomasi perlu diperhatikan antara lain :

- a. **Posisi** atau kepentingan nasional yang hendak diperjuangkan. Untuk itu perlu identifikasi dari kepentingan nasional pada sesuatu waktu dan suatu situasi.
- b. **Terhadap siapa** posisi atau kepentingan nasional tersebut hendak diperjuangkan: terhadap negara tertentu (bilateral), terhadap kawasan tertentu (regional), ataupun terhadap dunia internasional secara keseluruhan. Untuk itu seorang diplomat perlu mempunyai pengetahuan yang luas terhadap negara dan daerah dimana dia ditugaskan, serta pengetahuan terhadap situasi global yang dapat berpengaruh.

**Diplomat tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi diplomat yang berkemampuan. Perlu ada usaha untuk menghasilkan diplomat yang handal.**

- c. **Bagaimana cara** memperjuangkan kepentingan nasional atau posisi tersebut untuk itu diperlukan : kemampuan teknis / profesional para diplomat ; pengertian terhadap taktik dan strategi menyampaikan pandangan/perundingan; kemampuan memanfaatkan funds and forces yang ada secara hemat, efisien dan efektif.

Singkatnya, dalam diplomasi diperlukan: pengetahuan tentang masalah yang dihadapi; kemampuan memilih dan memanfaatkan cara dan

alat yang tersedia ; kemampuan berkomunikasi; kemampuan berbahasa yang mampu menjelaskan dan meyakinkan.

## Diplomasi Indonesia Secara Empiris

Kerajaan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan telah lama berdiplomasi dengan luar negeri, misalnya :

Sudah sejak abad ke-12 (1280) utusan Kubhilai Khan datang ke Singosari untuk minta agar Kertanegara memberi upeti kepadanya. Tuntutan ini ditolak yang kemudian menyebabkan Kubhilai Khan mengirim armadanya pada tahun 1289 yang bermaksud untuk menghancurkan Singosari.

Pada tahun 1522 D'albuquerque, Gubernur Portugis di Malaka pada waktu itu, mengirim utusan ke Sunda (Jawa Barat) untuk meminta hubungan dagang yang diterima oleh Raja Sunda untuk menghadapi tantangan dari Demak.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga telah mengirim utusan ke luar negeri mencari hubungan dan aliansi, misalnya Aceh yang mengirim utusan ke Turki (pertengahan abad-16) untuk minta bantuan dalam menghadapi Portugis di Malaka, yang kemudian diberikan oleh Turki.

Dalam abad-16 itu pula Tidore dibantu oleh Spanyol untuk berperang melawan Temate yang dibantu oleh Portugis, dan dalam tahun 1667 Raja Mataram di Jawa meminta bantuan Belanda untuk menghadapi pembontakan didalam kerajaannya dan sebagai balasannya Belanda mendapatkan wilayah kekuasaan serta hak-hak khusus dalam perdagangan.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia pada abad-abad tersebut juga sudah banyak melaksanakan diplomasi perdangan sampai-sampai ke India, Laut Merah dan Turki (Constantinopel).

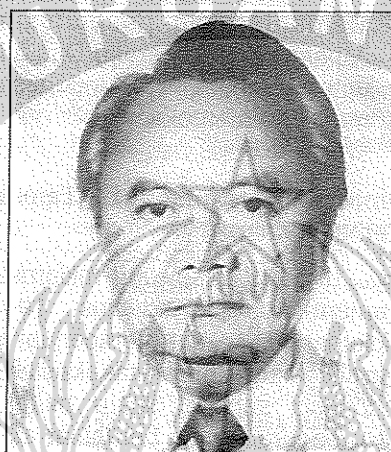


# Diplomacy in an Era of Globalization

By: Hasyim Djalal

**D**iplomacy is often associated with politics and particularly with international relationships between countries.

- a. Diplomacy must consider, among other matters, national interests and positions that need to be maintained based on a regular review of these under given circumstances at particular times.
- b. A decision must then be made on where to project these national interests and concerns – whether to a particular country (bilaterally), regionally, or to the international community generally. This means that a diplomat must have a broad knowledge of the nation or region to which he is assigned, as well as a good understanding of the global environment that may be influential.
- c. Pursuing national interests and positions requires : technical competence and professionalism on the part of diplomats, an understanding of the tactics and strategies required in negotiation and in presenting an opinion, and the ability to deploy available funds and resources efficiently and effectively.



## **An Empiric Evaluation of Indonesian Diplomacy**

Indonesian kingdoms were long accustomed to international diplomacy prior to the advent of independence, for example :

as far back as the 13<sup>th</sup> century (1280) couriers of the Kubhilai Khan had come to the court of Singosari seeking that the kingdom pay homage to him. When this homage (by way of levies) was denied, Kubhilai Khan sent an armada with instructions to destroy Singosari.

In 1522, D'alburquerque, the Portuguese Governor of Malaka at that time, sent an emissary to West Java (Sundanese lands) seeking trade ties. These were accepted by the Sundanese king to help resist a threat from the neighboring kingdom of Demak.

Javanese kingdoms also dispatched envoys overseas seeking contact and alliances. Aceh, for

example, sent representatives to Turkey (mid 17<sup>th</sup> century) to request help in facing the Portuguese of Malaka. This initiative received a positive response.

In that same century, Tidore received Spanish help in a war against Ternate – which had won support of the Portuguese and, in 1667, the Javanese King of Mataram sought help of the Dutch in facing an internal revolt. In return the Dutch received an area of authority and special trading privileges.

The Indonesian kingdoms in those centuries also engaged in extensive trade diplomacy. This extended as far as India, the Red Sea and Turkey (Constantinople).

The distinguishing features of Indonesian diplomacy in those days were :

the general populace were not usually involved, diplomacy was very much the property of regal palaces (keratons) and of the royal family and their close confidantes.

There were innumerable intrigues and conspiracies among various kingdoms that were deployed to confront their enemies – whether their co-Indonesians or external enemies.

These machinations opened a wide opportunity for international political intervention through "divide and rule" stratagems. There were many Indonesian kings who sided



Ciri-ciri diplomasi Indonesia pada waktu itu memperlihatkan :

Belum melibatkan seluruh rakyat, tapi masih sangat bersifat diplomasi istana atau keraton, beserta keluarga-keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Sangat banyak intrik dan persekongkolan antara berbagai kerajaan menghadapi lawan-lawannya, baik sesama orang Indonesia sendiri maupun menghadapi dunia luar.

Situasi intrik dan persengkolan ini telah membuka banyak peluang untuk penetrasi asing melalui politik *divide et impera* (memecah belah dan menguasai). Banyak raja-raja Indonesia yang memihak orang asing untuk menghadapi bangsanya atau saudaranya sendiri.

*Catatan:* cukup banyak pengalaman sejarah masa lalu yang dapat dijadikan bahan pelajaran dalam mengembangkan diplomasi Indonesia untuk masa sekarang dan masa depan.

Pengalaman pahit selama zaman kolonial telah melahirkan Budi Utomo (1908) yang berusaha memajukan kesadaran berbangsa melalui pendidikan.

Dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan maka lahir pulalah kesadaran politik terutama sejak munculnya partai-partai politik sekitar tahun 1918 yang mulai bergerak dibidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan politik memerlukan kesatuan dan persatuan, dan kesadaran ini telah melahirkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan kesadaran orang-orang Indonesia untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia.

**Dalam era globalisasi peranan pemerintah menyusut dan karena itu diperlukan kerjasama yang lebih aktif dan produktif antara pemerintah dengan ketiga faktor non-pemerintah lainnya (organisasi regional, organisasi internasional, dan LSM).**

Memanfaatkan pendudukan Jepang selama Perang Dunia II untuk mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan.

**Diplomasi Indonesia di Zaman Kemerdekaan**

1945 - 1949 : setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diplomasi Indonesia memperjuangkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat atas wilayah Indonesia.

1949 - 1965 : setelah memperoleh pengakuan atas Kemerdekaan Indonesia bulan Desember 1949, Indonesia memperjuangkan konsolidasi, kesatuan dan persatuan didalam negeri dan memproyeksikan cita-cita Indonesia diluar negeri sebagai negara anti kolonial/anti imperialisme (diplomasi dekolonisasi). Tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain adalah : tantangan keagamaan (DI/TII), tantangan sisa-sisa kolonial (Westerling di Bandung dan Andi Aziz di Ujungpandang), tantangan kedaerahan/provinsionalisme (PRRI Permesta), tantangan mempersatukan kesatuan wilayah nasional (Irian Jaya, Wawasan Nusantara (13 Desember 1957) dan Hukum Laut), tantangan mempersatukan ABRI yang mulanya menganut berbagai-bagai wawasan, tantangan ideologi: percaturan antara nasionalisme-agama-komunisme (Nasakom) terhadap Pancasila, tantangan konstitusional : UUD 1945,

UUD RIS 1949, UUDS 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945, tantangan pembangunan ekonomi (inflasi sampai 650%), tantangan menggalang solidaritas regional dan internasional untuk menentang kolonialisme dan imperilisme: Konferensi Asia Afrika 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung; Konferensi Beograd 1961 yang melahirkan Non-Blok, tantangan menghadapi ekseseks politik luar negeri : terlalu dekat dengan RRC (Jakarta - Phnompenh - Hanoi - Beijing - Pyongyang axis) : radikalisme politik luar negeri yang cenderung anti Barat ; politik luar negeri " mercu suar" di Asia-Afrika dan negara-negara Non-Blok ; Konfrontasi dengan Malaysia keluar dari PBB.

1965 - 1998 : Zaman Orde Baru : Indonesia melaksanakan Diplomasi regionalisme dan pembangunan ekonomi antara lain : *menghilangkan konfrontasi* dengan Malaysia dan kembali ke PBB; membekukan *hubungan dengan RRC* dan menghidupkannya kembali 23 tahun kemudian; mengembangkan *kerjasama ASEAN* dan kemudian *APEC, ARF, ASEM* dan lain-lain ; meninggalkan politik "mercu suar" dan memusatkan perhatian kepada *pembangunan ekonomi; mempererat kesatuan dan persatuan* bangsa dengan Wawasan Nusantara dan pengembangan konsepsi-konsepsi Indonesia di bidang *Hukum Laut Internasional; pengembangan orientasi kelautan*; memperjuangkan integrasi *Timor Timur*; menghadapi perkembangan-perkembangan / *ketidak puasan* di Irian Jaya Aceh, dan daerah-daerah lainnya; menghadapi tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM, menghadapi perkembangan-perkembangan di *Indocina, Laut Cina Selatan dan Filipina Selatan*; menghadapi *berbagai-bagai isu di PBB* dan dikawasan serta isu-isu lainnya yang mulai mengglobal seperti *HAM, demokratisasi, ekonomi pasar, pemerintahan bersih, penegakan hukum, perlindungan lingkungan hidup, pelucutan senjata, pembangunan ekonomi, hubungan Utara-Selatan, Non-Blok, dan lain-lain.*

1998-sekarang : Era Reformasi.





with foreigners in confronting their own families and countrymen.

**Note :** this is adequate glance at past experiences for the purposes of developing current and future Indonesian diplomacy.

The bitter experience of the colonial era gave rise to the Budi Utomo movement in 1908 which sought to stimulate national consciousness through education.

With a rise in national consciousness there came a parallel political awareness especially with the emergence of political parties around 1918 which started to make political moves in the direction of Indonesian independence.

Political struggles call for unity and solidarity, and it was in awareness of this that the Youth Pledge of October 28<sup>th</sup> 1928 was made. This gelled Indonesian will for becoming a single nation, with a united land and a single language.

Exploiting the Japanese occupation of WWII prepared Indonesia's path to independence.

### **Indonesian Diplomacy Through The Independence Era**

From 1945 - 49 : After Indonesia proclaimed its independence on August 17<sup>th</sup> 1945, its diplomacy centered on winning international recognition for the existence of the Indonesia as a free and sovereign state having sovereignty over the lands of Indonesia.

From 1949 - 1965 : On winning recognition of its independence, Indonesia struggled for internal consolidation, unification and solidarity and projected itself on the international stage as a state opposed to colonialism and imperialism. Challenges faced included : religious conflicts – "DI" and "TII" being the acronyms accorded two Islamic based insurgencies, challenges from residual colonial elements (Westerling in

## **Now, however, we are in the grips of an internal crisis that calls for new ideas and new priorities for the conduct of our international diplomacy.**

Bandung and Andi Aziz in Ujung) regional or provincialist uprisings (PRRI "Permesta"), challenges to national integration (Irian Jaya, the Archipelagic Outlook [December 13<sup>th</sup> 1957] and Laws of the Sea), challenges to unifying ABRI which was initially fragmented ideologically, the interplay between nationalism-religion-communism (Nasakom) and Pancasila, constitutional challenges devolving around the 1945, 1949 and 1950 constitutions prior to a final acceptance of the 1945 constitution, challenges to economic development (inflation soaring to 650%), pressure on regional and international solidarity to challenge colonialism and imperialism. The Asia Africa Conference of 1955 which produced the five Bandung Principles and the Beograd Conference of 1961 that saw formation of the Non-blok movement, pressure from international political excesses – getting a little too close to China (the Jakarta-Phonpenh – Hanoi-Beijing-Pyongyang axis); radical politics tending to anti-westernism ; high profile politicking internationally in Asia-Africa and Non-Blok forums ; confrontation with Malaysia and eventual withdrawal from the United Nations.

From 1965 - 1998 : The New Order era: Indonesia undertook regional diplomacy and national development through : an end to the Malaysia campaign and a return to the United Nations ; 2. A freeze on ties with China that lasted 23 years ; development of ASEAN co-operation

and thereafter involvement with ASPEC, ARF, ASEM and other regional forums; a withdrawal from flamboyant political posturing in favor of concentration on national economic development ; a tightening of national unity and solidarity through deployment of the archipelagic concept and development of Indonesian perspectives on the law of the sea ; a refocusing of Indonesia on its oceanic resources ; the struggle for East Timor's integration ; facing the discontentment of Irian Jaya and other regions ; facing claims of breaches of human rights ; developments in the Indo-China, the South China Sea, and Southern Philippines ; facing numerous issues within the UN and though the region that came from a tendency to globalization of issues such as human rights, democracy, market economics, clean governance, law enforcement, environmental protection, disarmament, economic development, North - South ties, the Non-blok movement and numerous others.

From 1998 - current : The Reform era where Indonesian diplomacy needs to be developed to respond to :

- a. Internal developments
- b. Regional developments
- c. International developments
- d. The demands of new paradigms and new needs.

### **Diplomatic Techniques**

There are numerous diplomatic techniques that can be applied according to circumstances. These include ;

1. The use of military capacity to support peace initiatives (the classic approach). This approach was used through the struggle to achieve independence ; towards the liberation of Irian Jaya and in the confrontation with Malaysia.

**Note :** In the last days of the New



Diplomasi Indonesia perlu dikembangkan terutama berkenaan dengan :

- a. Perkembangan keadaan dalam negeri ;
- b. Perkembangan keadaan regional;
- c. Perkembangan situasi internasional ;
- d. Kebutuhan-kebutuhan dan paradigma-paradigma baru

### Cara atau Teknik Diplomasi

Cara atau teknik diplomasi itu bermacam-macam, sesuai dengan situasi dan keadaan yang dihadapi, antara lain:

1. Mempergunakan kemampuan militer untuk mendukung usaha-usaha damai (cara-cara klasik). Cara ini dilakukan selama perjuangan kemerdekaan pada saat dilakukan usaha-usaha pembebasan Irian Barat dan pada saat konfrontasi dengan Malaysia.

**Catatan :** Dizaman akhir Orde Baru kemampuan militer banyak dituduhkan digunakan (disalahgunakan?) untuk mendukung elite penguasa dan untuk menindas dissent.

2. Memobilisir dukungan rakyat. Cara ini dilakukan pada saat perjuangan kemerdekaan, selama Perang Kemerdekaan dan ketika berusaha melaksanakan pembangunan nasional yang merata, vertikal maupun horisontal.
3. Memobilisir unsur-unsur kekuatan nasional / kebangsaan antara lain dengan melakukan diplomasi kebudayaan, preventive diplomacy dan regional role
4. Menumbuhkan diplomat-diplomat yang berkemampuan

Diplomat tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi diplomat yang berkemampuan. Perlu ada usaha untuk menghasilkan diplomat yang handal. Diplomat Indonesia mula-mula digembleng oleh pengalaman dan perjuangan selama Perang Kemerdekaan (tanpa melalui pendidikan khusus) ; Kemudian diplomat itu

dididik melalui pendidikan khusus (Akademi Dinas Luar Negeri, Caraka, Susdubad, Sekdilur). Maksudnya untuk mengembangkan diplomat profesional. Dengan pendidikan ini diharapkan mereka dapat memahami apa yang diinginkan oleh bangsa dan negara (kepentingan nasional); berwatak dan bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (dan UUD 1945); berpendidikan, pengetahuan dan pengalaman dibidang profesi diplomasi dan politik luar negeri; berkemampuan berkomunikasi untuk meyakinkan pihak lain terhadap kebenaran pandangan dan kebijaksanaan Indonesia; menguasai bahasa-bahasa yang dipakai dalam diplomasi internasional.

*Ciri-ciri sosok diplomat* yang ideal adalah hemat, cermat/efisien/efektif, rajin, jujur, bertepatan waktu dan janji, bijaksana dan tegas, berani tapi penuh perhitungan, teguh memegang prinsip toleran terhadap perbedaan pandangan dan pikiran, dan mampu mencari jalan keluar dari situasi politik.

*Hakekat diplomasi Indonesia* selama ini adalah :

tidak "rutin", tetapi sekali-sekali boleh menempuh cara-cara yang tidak "konvensional", yang tidak terialu terikat pada tugas rutin, tetapi tanpa mengabaikan norma-norma dan tata krama internasional; tidak bersikap gagah-gagahan atau radikal-radikalan; teguh dalam pendirian dan prinsip, tegas dalam sikap dasar, gigih dalam upaya, namun luwes dalam pendekatan, dan percaya pada diri sendiri; tidak sekedar reaktif, tetapi secara aktif dan dinamis berperan menuju sasaran yang jelas; mencari keharmonisan antara negara dan menjauhi sikap konfrontasi atau penggunaan kekerasan/kekuasaan; berusaha memperbanyak kawan dan mengurangi lawan; ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap; berprakarsa, kreatif dan asertive.

Dalam era *globalisasi*, disamping cara dan teknik tersebut diatas, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia perlu lebih berpegang kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

(a) memegang teguh nilai dan jati diri kebangsaan, serta prinsip-prinsip politik luar negeri;

(b) mampu mewujudkan harmoni dan paduan yang serasi antara idealisme dan pragmatisme;

(c) mampu melakukan kerjasama yang komprehensif, tetapi sekaligus juga mampu bersaing secara sehat;

(d) mampu merumuskan kebijakan yang tepat dan didukung oleh sumber daya yang dimiliki;

(e) mampu mengembangkan diplomasi yang cerdas dan pro-aktif, luwes, piawai, tanpa meninggalkan jati diri, nilai dan prinsip dasar kebangsaan.

### Era Globalisasi

#### 1. Hakekat

(a) **Globalisasi Gagasan** (ideas) : perlindungan HAM, demokratisasi/pemerintahan bersih, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, ekonomi pasar .

(b) **Globalisasi Informasi** : televisi/media massa, jaringan internet

(c) **Globalisasi Komunikasi**: telephone/telekomunikasi, transportasi, perdagangan, ekonomi, keuangan.

#### 2. Situasi dunia pasca Perang Dingin:

(a) **Hakekat konflik** : konflik ideologi antara komunisme dan kapitalisme berkurang dan konflik non-ideologi muncul dalam berbagai-bagai bentuk; konflik-konflik dalam negara lebih banyak muncul sedangkan konflik antar negara tidak terselesaikan; bobot kepentingan ekonomi dalam konflik semakin lebih menonjol; aktor non-negara (LSM, organisasi regional/internasional) makin lebih banyak berperan.

(b) **Modalitas penyelesaian konflik**

mekanisme PBB dan me-



Order there were numerous charges that the military were being used (abused?) to support the power-wielding elite and to crush dissent.

2. Mobilizing public support ; this method was used also during the struggle for independence, through the ensuing war , and then in efforts towards national development both vertically and horizontally.
3. Mobilizing national/state resources through such measures as cultural diplomacy, preventative diplomacy and through regional roles.
4. Developing ambassadorial competence.

Diplomats don't just spring up – especially good ones. Efforts and input must be made to produce them. In our earlier days Indonesia's diplomacy was shaped the struggle for independence (for which no special training had been given) ; these "instant" diplomats were then provided with special training (The Foreign Affairs Service Academy) with the target of producing professional diplomats. Through this training it was hoped that these personnel would gain a better understanding of the national interests, gain a Pancasilaist outlook and perspective in line with the national constitution of 1945, gain expertise in diplomacy and international affairs, develop communication skills appropriate to convincing the international community of the validity of Indonesian viewpoints and policies, and to reach competence in the language of international diplomacy.

The ideal attributes of a diplomat were to be economical, efficient and effective, hard-working, honest, prompt and conscientious, wise and firm, having courage but use this with careful consideration, hold closely to the principle of tolerance in the face of differences of ideas and standpoints, and being able to find solutions to political problems.

*The essence of Indonesian diplomacy to date has been :*

Not to conduct business "routinely" ; scope has been left for trying unconventional methods – whilst not breaching international protocols ; not to be over-bearing or radical ; to be calm and cool-headed in principle and in positioning, firm in basic principles and unrelenting in effort but flexible in approach, having self-confidence whereby to avoid being simply reactive, but also dynamic in assuming roles addressing clear targets ; to seek harmony between nations and to avoid confrontation or the use of force ; to strive to win more friends and thin the ranks of enemies ; to rely on responsive professionalism ; to be creative and assertive.

In an era of globalization, aside from these techniques, Indonesian foreign diplomacy and politics need also to closely adhere to the following principles ;

- (a) to hold firm to national values and the principles of international politics ;
- (b) to strike an effective balance between idealism and practicality ;
- (c) to be able to cooperate comprehensively without losing the ability for healthy competition ;
- (d) competence in formulating appropriate policies supported by available resources ;
- (e) to be able to be "smart" in proactive diplomacy that is flexible, competent, and consistently in line with basic values, norms and premises of the state.

### The Era of Globalization

#### 1. Fundamentals

- (a) Globalization of Ideas : human rights protection, democracy / clean government, law enforcement, environmental protection, market economies.

- (b) Globalization of Information : television/mass media, the internet
- (c) Globalization of Communication : telephone/telecommunications, transport, trade, economy, and finance.

#### 2. A Post - Cold War World :

- (a) The essential seed of conflict between ideologies (communism and capitalism) has faded in significance to be replaced by non-ideologically based disputes with numerous manifestations : civil conflicts have become more prominent while international conflicts have been left unresolved ; economic considerations as a factor feeding conflict have become more prominent ; non-state elements (NGO's, regional and international organizations) have been playing more significant roles.

#### (b) Conflict Resolution Modes

- UN bodies and regional institutions have been seen to play a more important part ;
- Power politics and the use of military force is on going ;
- The resolution of conflict through legal channels such as the ICJ and other high courts has become more common – although the effectiveness of this has remained limited ;
- Economic sanctions from the UN are often used but lack short-term effectiveness while being seen to impact hardest on the least protected elements of a society ;
- Peace keeping missions of the UN or of regional bodies have become more common ;
- Preventative diplomacy has attracted increasing attention especially among ARF nations and in matters relating to the oceans.





kanisme regional terlihat lebih penting;

- permainan power politics dan penggunaan kekuatan militer tetap berlanjut;

- penyelesaian konflik melalui jalur-jalur hukum, seperti ICJ dan Mahkamah-Mahkamah lainnya, semakin meningkat, walaupun efektifitasnya masih terbatas;

- sanksi-sanksi ekonomi melalui PBB lebih sering dipakai walaupun kurang efektif dalam jangka pendek dan terkesan lebih banyak merugikan rakyat kecil yang tidak bersalah;

- misi penjaga perdamaian, baik melalui PBB ataupun organisasi regional, makin banyak dipakai;

- modalitas preventive diplomacy semakin banyak menarik perhatian, terutama dikalangan ARF dan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan;

- kemungkinan intervensi eksternal terhadap masalah dalam negeri sesuatu negara menjadi lebih meningkat; dalam hal perang saudara, ethnic cleansing (begitu juga jika terjadi cultural, religius, ataupun racial cleansing), pembantaian massal/genocide/pelanggaran HAM yang keterlaluan, tragedi kemanusiaan yang luas, degradasi lingkungan, terutama yang bersifat lintas Negara.

### (c) Konstelasi dan situasi internasional/global

#### 1. Pengelompokan negara-negara

- pendukung demokrasi dan rule of law dan yang bukan;

- negara-negara maju, negara-negara industri baru dan negara-negara yang belum maju;

- super-power, middle-power,

dan small-power;

- pengelompokan masa lalu mulai kehilangan makna seperti Timur Barat, Utara-Selatan, maju dan berkembang, komunis dan kapitalis.

#### 2. Interaksi kepentingan

- kepentingan nasional tetap menonjol, tetapi semakin banyak diusahakan melalui usaha-usaha kolektif, baik secara regional maupun dibawah naungan PBB;

- tema-tema "universal" semakin banyak dipakai sebagai alat politik seperti demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ekonomi pasar, dan aturan penegakan hukum;

- peranan aktor-aktor non-negara semakin meningkat;

- konflik-konflik yang ditimbulkan oleh aktor-aktor non-negara juga meningkat, seperti terorisme internasional;

- tindakan bersama melalui organisasi regional mulai muncul seperti tindakan NATO di Kosovo.

#### 3. Dampak Perkembangan Globalisasi terhadap Indonesia

*Penetrasi "nilai-nilai universal"* terhadap kehidupan bangsa (HAM, demokratisasi/pemerintahan bersih, ekonomi pasar, perlindungan hidup, penegakan hukum). Kelima nilai-nilai universal ini juga adalah agenda reformasi Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan bangsa Indonesia tanpa menimbulkan riak-riak yang dapat mengganggu kestabilan dan keserasian serta persatuan dan kesatuan Indonesia.

*Peranan aktor-aktor non-pemerintah internasional* (organisasi regional, organisasi internasional dan LSM) dalam masalah-masalah yang selama ini dianggap masalah dalam negeri Indonesia, semakin meningkat dalam memajukan kelima nilai tersebut diatas.

Panetrasi nilai-nilai universal

tersebut telah pula menimbulkan *konflik nilai* dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia.

Dalam era globalisasi *peranan pemerintah menyusut* dan karena itu diperlukan kerjasama yang lebih aktif dan produktif antara pemerintah dengan ketiga faktor non-pemerintah lainnya (organisasi regional, organisasi internasional, dan LSM).

Untuk menyikapi penetrasi nilai-nilai universal tersebut terutama untuk melaksanakan politik dan hubungan luar negeri, perlu ditetapkan paradigma, konsep, doktrin, kebijakan dan strategi baru.

Dalam menetapkan hal-hal itu perlu lebih memperhatikan keadaan dalam negeri Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi dan bahaya-bahaya disintegrasi; perlu lebih memperhatikan kemungkinan meningkatnya peranan asing dalam percaturan kebijaksanaan dalam negeri dan regional; berbagai konflik domestik, jika tidak segera ditangani, akan cepat menimbulkan masalah-masalah baru dalam politik luar negeri Indonesia.

Oleh karena itu perlu dikembangkan paradigma-paradigma baru dalam hubungan regional, khususnya dikawasan sekitar Indonesia.

#### 4. Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi

*Pembukaan UUD 1945* menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(Catatan: Dewasa ini banyak dibicarakan masalah perubahan UUD 1945)

Politik luar negeri sesuatu negara, termasuk Indonesia, haruslah mencerminkan keadaan dan aspirasi bangsa tersebut pada sesuatu masa. Karena itu, walaupun prinsip-prinsip dasarnya barangkali tetap bisa berlaku, namun dalam



- The possibility of international intervention in a national issue is increasing especially where issues of civil war, ethnic cleansing (or religious, cultural or racial cleansing), genocide or other excessive breaches of basic human rights, large scale human tragedies, environmental degradation, and more particularly where any of these occur across national borders.

(C) The International/Global

1. Constellation/Alignment of Nations

- The supporters of democracy and the rule of law and those not supportive;
- The advanced nations, newly industrialized nations, and the yet to be developed nations ;
- Super-powers, mid-powers, and small-power groupings;
- Old style delineation such as East and West, North and South, advanced and developing nations, communist and capitalist are beginning to lose their significance.

2. Interaction Between Interests

- national interests still dominate – but this dominance is being increasingly diminished by collective action at regional or UN level;
- “universal” themes are increasingly deployed as political weapons; democracy, Human Rights, the environment, market economy and law enforcement are common examples;
- the role of “non-state” agents is growing;
- conflicts stirred by non-state agents are also increasingly common – international terrorism for instance ;
- regional organizations have become increasingly active in group projects since NATO’s

intervention in Kosovo.

3. The Impact of International Developments On Indonesia

The penetration of “universal values” on national life (human rights, democratization/ clean government, the market economy, the environment and law enforcement) has been increasingly felt. These five universal values have also set the agenda for Indonesia’s reformation. The problem has become one of how to instill these values into national life without creating ripples that can disrupt the stability and confraternity of Indonesians or challenge the nation’s unity and solidarity.

The role of international non-government actors (regional groupings, international groups and NGO’s) in what have been (until recently) deemed matters of Indonesian internal policy, has grown significantly in pursuit of the “five universals”.

Their penetration has also created a conflict of values underpinning the attitude and actions of the Indonesian state.

In an era of globalization, the government’s role diminishes and this calls for more effective and productive co-operation between governments and the three major non-government factors (regional, international and NGO groups).

To determine a response to incursions by these universal values - especially in determining a political international response – calls for deployment of new paradigms, concepts, doctrines, policies and strategies.

In looking at these, priority should fall on Indonesia’s internal situation ; currently one of economic crisis and dangers of national disintegration - a situation that opens the door to a higher possibility of international intervention in domestic

and regional affairs.

Numerous domestic conflicts , if not quickly addressed, will rapidly spawn new problems for Indonesian foreign policy.

This indicates a need for a new paradigm governing regional relations , especially in the region bordering Indonesia.

4. Indonesian Foreign Policy in an era of Globalization

Preamble to the Indonesian constitution of 1945 declares that Indonesia exists to : protect all the peoples and races of the Indonesian community ; promote the general welfare ; educate the people and national life ; and to participate in the world order based on independence, sustained peace and social justice.

(note : these days there are numerous calls for amendment of the constitution)

International diplomacy of all nations, including Indonesia, must reflect the situation and aspirations of a given nation at a given time. Therefore, although basic principles may be retained, implementation of these should be periodically adjusted in line with prevailing circumstances.

Indonesian diplomacy in the past appeared to focus on the fourth principle of “participating in the world order based on independence, sustained peace and social justice” - indeed it was Indonesia that became a pioneer of freedom struggles in Asia and Africa, helped develop perceptions for a new world order, played a major role in the non-bloc movement, amongst developing nations and enjoined numerous initiatives towards greater world peace.

These activities won wide accolades for Indonesian foreign policy at a time when we were positioned to participate and the world was ready for these initiatives..

Now, however, we are in the





implementasinya seyogyanya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa pada sesuatu ketika.

Dimasa yang lalu politik luar negeri Indonesia terkesan lebih menekankan kepada tujuan keempat, yaitu "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dimasa yang lalu, sesuai dengan keadaan pada waktu itu, Indonesia malah pernah menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan di dunia Asia Afrika, ikut mengembangkan persepsi tentang dunia baru yang diinginkan, dan malah mengambil peranan yang besar sebagai pemimpin gerakan Non-blok, Negara-negara Berkembang, dan kegiatan-kegiatan meningkatkan perdamaian dunia dan lain-lainnya.

Implementasi dari pelaksanaan kegiatan hubungan dan politik luar negeri yang menekankan kepada aspek keempat dari tujuan negara tersebut diatas telah membawa implikasi yang gemilang kepada politik luar negeri Indonesia, dan yang pada waktu itu didukung oleh situasi dunia yang memungkinkan dan kemampuan Indonesia untuk melaksanakannya.

Tetapi keadaan Indonesia kini yang berada dalam suasana krisis memerlukan pemikiran-pemikiran baru dan prioritas-prioritas dari pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia. Menghadapi abad-21, hubungan dan politik luar negeri Indonesia seyogyanya:

a. Ikut membantu pencapaian keempat tujuan negara tersebut diatas, dan dengan demikian juga memberikan bobot yang lebih banyak kepada usaha-usaha "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Ini antara lain berarti bahwa: Politik luar negeri harus mampu memantau dan mencegah ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan segenap bangsa Indonesia, terutama ancaman-ancaman yang mungkin datang

dari kekuatan-kekuatan diluar negeri yang dapat membawa disintegrasi terhadap kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia, termasuk usaha-usaha yang mendukung gerakan-gerakan separatis di Indonesia.

Politik luar negeri tetap berjuang melindungi "seluruh tumpah darah Indonesia" yang dalam tahun-tahun terakhir ini telah sangat berkembang pengertiannya, terutama sejak diterimanya konsepsi-konsepsi hukum laut Indonesia oleh dunia internasional. "Tumpah darah Indonesia" kini tidak lagi terpusat kepada daratan saja tetapi juga telah mencakup kawasan laut dan udara serta kekayaan alam yang sudah sangat luas. Karena itu kebijaksanaan Indonesia pada umumnya, termasuk politik luar negeri Indonesia di abad-21 haruslah lebih memberikan bobot kepada aspek kelautan dan kedirgantaraan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan matra ini.

b. Hubungan dan politik luar negeri juga haruslah memberikan bobot yang lebih besar untuk membantu usaha-usaha "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Tugas ini seyogyanya menjadi sangat menonjol dewasa ini dan dalam menghadapi abad-21, khususnya mengingat krisis ekonomi yang sedang dihadapi bangsa dewasa ini, apalagi jika diingat bahwa krisis ekonomi dan keuangan ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan-perkembangan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan maupun di dunia internasional.

c. Politik luar negeri juga harus membantu "mencetuskan kehidupan bangsa". Ini juga harus berarti bahwa hubungan dan politik luar negeri harus lebih memberikan bobot dan perhatian yang lebih banyak untuk membantu pengembangan-pengembangan usaha didalam negeri yang dapat mendorong usaha mencerdaskan

kehidupan bangsa tersebut. Ini berarti bahwa hubungan dan politik luar negeri harus dapat menimba sebanyak mungkin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diseluruh dunia dan membawanya ke Indonesia untuk dapat membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Walaupun disarankan adanya penekanan-penekanan seperti tersebut diatas, hal ini tentunya dilaksanakan tanpa meninggalkan tugas konstitusional sebagaimana tersebut dalam angka 4 tersebut diatas, yaitu "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", walaupun pelaksanaan daripada tugas itu kini seyogyanya memperhatikan keadaan ekonomi dan perkembangan bangsa yang kini berada dalam keadaan krisis.

Dengan demikian maka dalam menghadapi abad-21 ini, hubungan dan politik luar negeri Indonesia seyogyanya lebih banyak berorientasi kepada keadaan dan kebutuhan dalam negeri dan kawasan, dan karena itu kiranya wajar memberikan penekanan-penekanan dan prioritas-prioritas tertentu kepada hal-hal sebagai berikut:

a. **Menyelesaikan masalah Timor Timur** secara wajar dan tuntas, termasuk memburuknya hubungan dengan Australia dll. Masalah ini sedang ditangani;

b. **Mencegah disintegrasi bangsa.** Perlu dicegah agar masalah separatisme seperti di Irian Jaya dan Aceh tidak menjadi isu politik luar negeri, tetapi dapat segera ditanggulangi. Politik luar negeri harus lebih mapan menghadapi hal-hal ini.

c. **Memperbaiki citra Indonesia** didunia yang kian sangat terpuruk karena isu-isu yang berkaitan dengan HAM, demokratisasi, good governance (rule of law, corruption, nepotism), lingkungan hidup, militerisme, dan lain-lain.



Forum

d. Even though stress should fall on the foregoing matters, this does not mean that Indonesia should abandon its other constitutional duty to join international initiatives contributive to international order based on independence, sustained peace and social justice. Implementing these goals should be undertaken without forgetting the current situation of internal crisis that we now face.

We can conclude that as Indonesia enters the

grips of an internal crisis that calls for new ideas and new priorities for the conduct of our international diplomacy. Confronting the 21<sup>st</sup> century international politics and diplomacy should :

- a. Contribute to achievement of the 4 goals of state listed above with a special emphasis on measures to "to protect all the peoples and races of the Indonesian community". This also means that foreign policy must be able to monitor and prevent any threats to Indonesian unity and solidarity - especially any external threats acting towards disintegration of Indonesia, including any support for separatist movements in Indonesia.

External foreign policy still aims to protect "all Indonesian people"; a term that has undergone a lot of attention in recent years, especially since Indonesian concepts relating to the laws of the seas have been accepted by the international world. The concept of Indonesia now extends beyond just its land masses to encompass vast areas of ocean and the skies that rest above these.

This will be the general focus of Indonesian policy through the coming century; a stronger emphasis on Indonesia's achipalegic and oceanic interests and the maintenance and exploitation of application of this matrix.

- b. International politics and ties must also put more weight behind efforts to "advance the general welfare" in line with calls made for this in our national constitution . This task should get particularly high attention as we now con front the 21<sup>st</sup> century in a position of economic crisis – more so when we recall how closely this economic and financial crisis is tied to regional and international events and developments.
- c. Foreign policy must lend a spark to national intellectual life under the commitment to "mencerdaskan kehidupan bangsa"; it must attract support and input to back up domestic undertakings in science and technology expansion. Indonesia should contribute to international scientific development while improving the brainpower and knowledge of the Indonesian people.

21<sup>st</sup> century our international politics and diplomacy should put priority on national needs and situations and those of our closest borders. The following matters deserve this priority :

- a. To resolve the East Timor situation completely and sensibly, including such issues as the decline in relations with Australia and other associated situations. This is currently being undertaken.
- b. To prevent national disintegration. The problem of succession in Irian Jaya and Aceh should be prevented from becoming an international interest by prompt and effective national action. Our foreign diplomacy initiatives need a boost in this regard.
- c. To improve Indonesia's image globally ; a reversal of the current very low regard in which Indonesia is held through issues associated with Human Rights, democracy, good governance (including the rule of law, corruption and nepotism), the environment, militarism and so forth.





- d. **Membantu usaha-usaha mengatasi krisis ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum.** Politik luar negeri harus mencari jalan untuk ikut membantu mengatasi krisis ekonomi, misalnya dengan membantu meningkatkan ekspor, investasi, bantuan luar negeri, pariwisata, kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Disamping itu politik luar negeri kiranya juga harus dapat membantu mencari jalan untuk mengurangi beban hutang negara yang sangat berat.
- e. **Memelihara keserasian ASEAN dan ketahanan regional secara keseluruhan** dikawasan sekitar Indonesia, termasuk di Laut Cina Selatan, Pasifik Barat dan Samudera Hindia.
- f. **Mengembangkan orientasi kelautan yang lebih mantap** untuk dapat lebih menyumbang bagi pembangunan, keamanan dan pertahanan nasional.
- g. **Mencari peluang-peluang di dunia internasional yang**

### **Politik luar negeri Indonesia di abad-21 haruslah lebih memberikan bobot kepada aspek kelautan dan kedirgantaraan**

dapat membantu melaksanakan reformasi dan pembangunan nasional serta visi dan misi tersebut diatas.

Pengembangan sarana-sarana pendukung hubungan dan politik luar negeri haruslah disesuaikan dengan visi dan misi tersebut diatas dengan sejauh mungkin mempersiapkan sarana dan prasarana anggaran, materiil yang cukup dan memadai, mekanisme kerja yang efisien dan efektif, serta sarana sumber daya manusia (human resources) yang lebih professional. Campur tangan non-professional dalam diplomasi dan politik luar

negeri Indonesia, harus dikurangi sebanyak mungkin.

#### **Kesimpulan**

Dalam bulan Juni 1996 saya pernah menuliskan beberapa isu dalam negeri yang akan sangat berpengaruh terhadap perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Sebagian dari hal-hal yang saya sebutkan dalam tahun 1996 tersebut kemudian ternyata berkembang dengan cepat didalam era reformasi ini. Isu-isu tersebut antara lain adalah: pembangunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, orientasi kelautan, hukum dan keadilan, demokratisasi dan masalah HAM, peranan ABRI, masalah lingkungan hidup, dan lain-lain. Isu-isu ini akan tetap berpengaruh dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, paling tidak dalam masa depan yang dekat ini.

Disamping itu, perkembangan-perkembangan yang terjadi dikawasan sekeliling Indonesia, terutama di ASEAN / Asia Tenggara, Laut Cina Selatan, Asia-Pasifik, Samudera Hindia dan isu-isu yang berkembang di dunia internasional, terutama di PBB, juga akan berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia dan karena itu juga harus tetap merupakan perhatian dari politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.

perkembangan-perkembangan yang terjadi dikawasan sekeliling Indonesia, terutama di ASEAN / Asia Tenggara, Laut Cina Selatan, Asia-Pasifik, Samudera Hindia dan isu-isu yang berkembang di dunia internasional, terutama di PBB, juga akan berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia



Repro

Hendropriyono Law Office: LBH untuk prajurit TNI dan Polri





- d. To assist efforts to redress the economic crisis and advance general living standards. Foreign policy must also seek avenues whereby to help handle the economic crisis, perhaps through boosting exports, attracting investment, overseas aid, tourism, technical and scientific cooperation and others. Diplomacy should also seek measures whereby to reduce Indonesia's national debt—a debt which has recently become particularly burdensome.
- e. To safeguard the equanimity of ASEAN and overall regional resilience in the neighborhood of Indonesia, including within the South China Sea, the Pacific and the Indian Ocean.
- f. To promote a closer oceanic orientation in considering matters of national development, security and national

resilience.

- g. To pursue any opportunities or resources internationally that may help implement reform and national development in line with the vision and mission detailed above.

Development of associated supports through political and diplomatic channels must be conducted in accord with the mission and vision and adequately prepare, as far as possible, the capital and infrastructural needs—whether financial or material, an efficient and effective working mechanism, and a more professional human resource base. Any unprofessional interference in diplomacy and foreign policy must be held to an absolute minimum.

#### Conclusions

In June 1996 I wrote about several issues that would strongly influence formulation and implementation of Indonesian foreign policy.

Events that transpired subsequently indicate that several of these issues have rapidly taken center stage in Indonesia's era of reformation. Among these issues that I raised several years ago can be counted; national development, national unity and solidarity, an orientation to the oceans, law and justice, democracy and human rights issues, the role of the military, the environment and numerous others. These will continue to influence Indonesian foreign policy and diplomacy through the era of globalization—and especially in the near future.

This aside, developments in the neighborhood of Indonesia, especially within ASEAN/SE Asia, the South China Sea, the Asia-Pacific and the Indian Ocean as well as other issues being fanned on the international stage—particularly within the UN, will also affect Indonesia's foreign policy and need constant attention from our diplomats.

## BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

"TANPA ANDA KAMI TIADA"



Melayani :

- GIRO, DEPOSITO, TABUNGAN
- KREDIT INVESTASI, MODAL KERJA, ANEKA GUNA
- GARANSI / REFERENSI BANK
- KIRIMAN UANG / INKASO
- SETORAN PAJAK
- PEMBAYARAN TELEPON
- PEMBAYARAN PENSIUNAN

#### Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama :

Jl. Jend. Sudirman No. 377, Pekanbaru 28116. Telp. (0761) 37050, 37060 (4 Saluran), 21195, 24150, 20409, 21835  
Telex : 66122, 56222 BPD PBR, Fax 33397, 34712

#### Kantor Cabang :

Temblahan	Jl. Hangtuah No. 1 Telp. (0768) 22525, 21334 Telex. 56242 Fax. 22324	Batam	Jl. Pembangunan No. 1 Telp. (0778) 458343 458433, 459015 Telex. 58224 Fax. 455073	Pasar Pusat	Jl. Hasyim Azhari No. 12 Pekanbaru Fax. 848812 Telp. (0761) 23947 38801, 32872, 848711	Alr Molek	Jl. Jend. Sudirman Telp. (0769) 41435 41436, 41438 Fax. 41437
Tg. Pinang	Jl. Samudra No. 3-5 Telp. (0771) 21276, 22895 24334, Telex. 57145 Fax. 22895	Pkt. Kerinci	Jl. Raya Lintas Timur Telp. (0761) 95731, 95732 95735.	Bengkalis	Jl. Panlawan No. 15 Telp. (0766) 21569, 22541 Telex. 56363 Fax. 21784	Tg. Balai Karimun	Jl. Pertambangan No. 23 Telp. (0777) 31900, 22900 23623 Fax. 21012
Dumai	Jl. Sultan Syarif Qasyim Telp. (0765) 31079, 32074 Telex 58273 Fax. 31079	Tlk. Kuantan	Jl. Jend. Sudirman No. 114	Bangkinang	Jl. Prof. M. Yamin. SH 291 Telp. (0762) 20027, 20433 20432, Telex. 56263 Fax. 20137	Bgn. Slaplapi	Jl. Pemiagaan No. Telp. (0767) 24370
Selat Panjang	Jl. Diponegoro No. 58 Telp. (0763) 31249, 31719 Telex. 56361 Fax. 31307						

#### Kantor Kas

RSUD Pekanbaru : Jl. Diponegoro No. 2 Telp (0761) 44930  
Rengat : Jl. Veteran No. 12 Telp. (0769) 21234  
Rumah Sakit Ibnu Sina : Jl. Melati No. 60 Telp. (0761) 21190